



**PEMERINTAH
KOTA DUMAI**

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

BADAN PENDAPATAN DAERAH

bapenda.dumaikota.go.id



WALIKOTA DUMAI

PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 572/BAPPEDA/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI TAHUN 2025

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 368 Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 1 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 13 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALI KOTA DUMAI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI TAHUN 2025.**

- KESATU : Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025.
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja disusun dengan sistematika sebagai berikut
- a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Evaluasi hasil Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan;
 - c. BAB III : Rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
 - d. BAB IV : Penutup.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 31 Juli 2025

WALI KOTA DUMAI,



PAISAL

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penyusunan Perubahan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja ini disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, baik lingkungan internal maupun eksternal yang saling berpengaruh dalam penyelenggaraan pengelolaan pendapatan dan retribusi daerah. Adapun Perubahan Rencana Kerja yang dimaksud memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu satu Tahun Anggaran 2025.

Demikian Perubahan Rencana Kerja ini disusun, diharapkan dapat bermanfaat dan sebagai acuan dimasa yang akan datang.

Dumai, 21 Juli 2025



KEPALA,

FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19780710 199711 1 001

DAFTAR ISI

		Halaman
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1.	Latar Belakang	4
1.2.	Landasan Hukum	5
1.3.	Maksud dan Tujuan	6
1.4.	Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI PERUBAHAN RENJA PD TAHUN LALU	8
2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	8
2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan PD	15
2.3.	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	18
2.4.	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	20
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD	33
BAB IV PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD	51
BAB V PENUTUP	61

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
T-C. 29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Dan Pencapaian Renstra Tahun 2023.....	8
T-C. 30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai	17
T-C. 31	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai	22
T-C. 32	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025.....	30
T-C. 33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja). Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025. Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2025, melalui tahapan-tahapan: Persiapan penyusunan; Penyusunan rancangan awal; Penyusunan rancangan; Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; Perumusan rancangan akhir; dan Penetapan.

Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai adalah penjabaran dari Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026. Kedua dokumen tersebut mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai tahun 2025 serta mendasarkan pada RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 dan RPJPD Kota Dumai Tahun 2005 - 2025. Selain itu dokumen lain yang dijadikan perhatian dalam penyusunan adalah Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029 dan Proyek Strategis Nasional dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai tahun 2025, dimana pencapaian sasaran-

sasaran pembangunan yang direncanakan tetap memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan Pemerintah Pusat. Sebagai dokumen rencana tahunan, Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kota Dumai mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Perubahan Perubahan Renja PD merupakan acuan bagi PD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam Perubahan KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Perubahan Rencana Kerja Anggaran (P-RKA) pada tahun 2025;
2. Perubahan Perubahan Renja PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan PD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja PD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Kerja Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tk. II Dumai;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.3406 Tahun 2024 Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050.5889. tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai;
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Walikota Dumai Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Peranakat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Walikota Dumai Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai;

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 yaitu untuk memenuhi amanat Pasal 143, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 yakni sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Maksud :
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.
2. Tujuan:
 - a) Menetapkan perubahan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif Tahun 2025 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisa dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan;

- b) Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 pada periode Tahun 2025;
- c) Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Perubahan Renja PD mempedomani Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PERUBAHAN RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra PD ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauhmana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra PD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Pencapaian target kinerja dinilai melalui suatu standar yang mampu menggambarkan tingkat keberhasilan dari program dan kegiatan yang direncanakan, berupa indikator dengan target kinerja sebagai instrumen penilaian.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan IV adalah sebagai berikut :

1. Tingkat penyerapan anggaran program dan kegiatan untuk Tahun 2024 sampai dengan triwulan IV adalah sebesar **66,10 %** atau sebesar Rp. 36.982.584.416,00 dari total anggaran sebesar Rp. 55.945.545.595,00.
2. Dalam sebuah program dan kegiatan, serapan anggaran menjadi indikator keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran yang telah disiapkan. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Dumai pada tahun 2026 telah mencatatkan serapan anggaran sebesar 66,10%. Meskipun terdapat pencapaian yang cukup signifikan dalam penyerapan anggaran beberapa sub kegiatan, namun terdapat tantangan yang cukup besar di tengah kondisi keuangan daerah yang mengalami penurunan pada akhir tahun 2024. Penurunan kondisi keuangan ini berdampak pada berbagai aspek perencanaan dan pelaksanaan anggaran di tahun 2024. Pada akhir tahun 2024, Pemerintah Kota Dumai menghadapi kondisi keuangan yang cukup menantang. Terjadinya penurunan signifikan pada pendapatan daerah dan adanya sejumlah kewajiban fiskal yang harus dipenuhi menyebabkan terbatasnya likuiditas dan kapasitas fiskal daerah. Hal ini kemudian berdampak pada keterbatasan ruang gerak dalam membiayai program-program strategis, termasuk di sektor pendapatan yang dikelola oleh Bapenda. Pemerintah Kota Dumai menghadapi kenyataan bahwa untuk beberapa program pengumpulan pajak dan retribusi, alokasi anggaran tidak dapat teralokasikan secara optimal akibat adanya potensi penerimaan yang hasilnya tidak sesuai ekspektasi dan ketergantungan pada transfer dana dari pusat yang tidak dapat dipastikan besarnya. Keterbatasan alokasi anggaran ini juga disebabkan oleh pengalihan

prioritas anggaran untuk program-program yang bersifat mendesak, seperti pemulihan ekonomi daerah dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

3. Untuk mengatasi kendala ini, Bapenda Kota Dumai akan terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dengan mengoptimalkan program-program yang ada, serta melakukan beberapa langkah perbaikan, antara lain:
 - a. **Prioritas Program yang Berdampak Langsung pada Pendapatan Daerah**
Bapenda akan lebih fokus pada program-program yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
 - b. **Penguatan Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan**
Untuk meningkatkan penerimaan daerah, Bapenda akan memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak, baik instansi pemerintah lainnya, sektor swasta, maupun masyarakat dalam rangka meningkatkan basis pajak daerah.
 - c. **Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran**
Dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas pengelolaan anggaran, Bapenda akan terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2025 (tahun berjalan) disajikan pada Tabel T-C.29 sebagai berikut :

5	2	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	dokumen	-	2	2	100%	2	4	200%
5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	laporan	1	4	4	100%	4	9	225%
5	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	laporan	1	1	1	100%	1	3	300%
5	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	3	dokumen	12	3	3	100%	3	18	600%
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74	bulan	14	74	74	100%	74	162	219%
5	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	laporan	12	2	2	100%	2	16	800%
5	2	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	dokumen	-	1	1	100%	1	2	200%
5	2	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2	laporan	1	2	2	100%	2	5	250%
5	2	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	laporan	12	2	2	100%	2	16	800%
5	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3	laporan	12	3	3	100%	3	18	600%
5	2	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2	unit	12	2	2	100%	2	16	800%
5	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	74	paket	1	1	1	100%	74	76	103%
5	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	74	orang	12	82	82	100%	74	168	227%

5	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	154	dokumen	12	154	154	100%	154	320	208%
5	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	12	1	1	100%	1	14	1400%
5	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	paket	12	2	2	100%	2	16	800%
5	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	paket	12	3	3	100%	3	18	600%
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	12	2	2	100%	2	16	800%
5	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4	dokumen	12	4	4	100%	4	20	500%
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	laporan	12	160	160	100%	150	322	215%
5	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28	unit	1	69	69	100%	28	98	350%
5	2	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	unit	-	1	1	100%	0	1	#DIV/0!
5	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	unit	12	30	30	100%	10	52	520%
5	2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16	unit	12	37	37	100%	16	65	406%
5	2	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	unit	-	1	1	100%	1	2	200%
5	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11	laporan	1	11	11	100%	11	23	209%
5	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	laporan	12	2	2	100%	2	16	800%

5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	laporan	12	4	4	100%	4	20	500%
5	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	laporan	6	1	1	100%	1	8	800%
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	laporan	12	4	4	100%	4	20	500%
5	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167	unit	12	167	167	100%	167	346	207%
5	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	unit	12	9	9	100%	9	30	333%
5	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	156	unit	12	156	156	100%	156	324	208%
5	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	3	1	1	100%	1	5	500%
5	2	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	2	1	1	100%	1	4	400%
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	100	100 %	99	100	100	100%	100	299	299%
5	2	4	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target pajak Daerah	100	100 %	1	100	100	100%	100	201	201%
5	2	4	2.01	1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1	dokumen	6	1	1	100%	1	8	800%
5	2	4	2.01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1	dokumen	1	1	1	100%	1	3	300%

5	2	4	2.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1	laporan	9	1	1	100%	1	11	1100%
5	2	4	2.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1	unit	12	1	1	100%	1	14	1400%
5	2	4	2.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	10	laporan	3.000	10	10	100%	10	3.020	30200%
5	2	4	2.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1	laporan	90	1	1	100%	1	92	9200%
5	2	4	2.01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	10	pajak	160	10	10	100%	10	180	1800%
5	2	4	2.01	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	10	dokumen	8	10	10	100%	10	28	280%
5	2	4	2.01	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1000	layanan	2	2.000	2.000	100%	1000	3.002	300%
5	2	4	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1	dokumen	4	1	1	100%	1	6	600%
5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1	dokumen	425	1	1	100%	1	427	42700%
5	2	4	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1	dokumen	35	1	1	100%	1	37	3700%
5	2	4	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4	dokumen	4	1	1	100%	4	9	225%
5	2	4	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	laporan	-	1	1	100%	1	2	200%
5	2	4	2.01	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4	laporan	-	-	-	0%	4	4	100%

Penyajian Tabel T-C.29 diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari 46 Sub Kegiatan yang dilaksanakan terdapat 46 sub kegiatan yang capaian indikator kinerjanya tercapai 100%, adapun faktor-faktor keberhasilan yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :
 - a. Kepemimpinan yang baik
Kepemimpinan yang baik akan mempengaruhi kinerja suatu program/kegiatan karena pemimpin yang baik dapat memberikan arahan yang jelas, memotivasi tim, dan mengambil keputusan yang tepat.
 - b. Sumber daya yang memadai
Sumber daya yang memadai seperti anggaran, tenaga kerja, bahan-bahan, dan peralatan yang diperlukan sangat penting dalam menunjang kinerja suatu program/kegiatan.
 - c. Perencanaan yang matang
Perencanaan yang matang akan memastikan bahwa program/kegiatan dilaksanakan dengan baik dan efisien. Perencanaan yang matang juga memungkinkan adanya evaluasi dan pemantauan yang terus-menerus.
 - d. Pelaksanaan yang tepat waktu
Pelaksanaan program/kegiatan yang tepat waktu akan memastikan bahwa program/kegiatan selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
 - e. Evaluasi dan pemantauan yang terus-menerus
Evaluasi dan pemantauan yang terus-menerus akan membantu mengevaluasi kinerja program/kegiatan dan memberikan umpan balik yang diperlukan untuk perbaikan di masa depan.
 - f. Keterlibatan masyarakat
Keterlibatan masyarakat dalam program/kegiatan dapat mempengaruhi kinerja program/kegiatan karena masyarakat dapat memberikan masukan, dukungan, dan partisipasi yang dibutuhkan.
 - g. Kesesuaian dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku
Kesesuaian program/kegiatan dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku sangat penting untuk menjamin keberhasilannya.
 - h. Kompetensi dan motivasi tim pelaksana
Kompetensi dan motivasi tim pelaksana akan mempengaruhi kinerja program/kegiatan karena tim yang kompeten dan termotivasi akan lebih efektif dalam melaksanakan program/kegiatan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Analisis Kinerja Badan Pendapatan Daerah yang telah dilakukan dan permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja, yaitu:

- 1). Masih belum banyaknya produk hukum yang berkaitan dengan optimalisasi pendapatan daerah, seperti Peraturan Walikota, Keputusan Walikota dan

Standar Operasional Prosedur mengenai pelayanan pajak daerah, PBB, BPHTB, yang dapat dijadikan acuan kerja sehingga masih menyulitkan untuk melakukan upaya peningkatan kinerja dan mengevaluasi kinerja;

- 2). Kualitas sumber daya manusia di bidang pendapatan daerah yang belum memadai khususnya dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah, PBB dan BPHTB, karena pegawai yang ada belum sepenuhnya cukup dalam mengatasi permasalahan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Keterbatasan kuantitas SDM ini juga disebabkan terbitnya berbagai regulasi baru tentang pendapatan daerah sehingga persepsi dari setiap pegawai Badan Pendapatan yang belum merata tentang regulasi tersebut. Selain itu kelemahan lainnya di bidang SDM adalah Badan Pendapatan Daerah belum memiliki auditor, juru sita dan Sistem Pengawasan Internal (SPI), padahal jabatan fungsional tersebut sangat dibutuhkan;

Langkah yang perlu diambil guna meningkatkan pencapaian sasaran outcome dimasa yang akan datang adalah:

- a. Optimalisasi Sumber Daya Manusia untuk mencapai sasaran demi mewujudkan tujuan organisasi dengan cara mengarahkan personil sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- b. Upaya meningkatkan potensi daerah yang terbatas, dengan cara :
 - 1) Mengadakan pengkajian dan penelitian yang ada kaitannya dengan potensi Pendapatan Daerah;
 - 2) Mengintensifkan Potensi daerah yang ada, melalui :
 - Penggalan potensi Pendapatan Daerah yang dimungkinkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang Pendapatan Daerah;
 - Penyesuaian sistem pengelolaan anggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan pola peningkatan kerjasama Pemerintah, swasta dan masyarakat.
 - 3) Pemenuhan kebutuhan organisasi dalam pelaksanaan pelayanan internal dan eksternal dengan penetapan sistem pelayanan minimal.
- c. Melakukan konsultasi dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan Pendapatan Daerah. Meskipun dana untuk mengikutsertakan pegawai pada kegiatan khusus belum tersedia, namun aktivitas dan kegiatan lain yang ada kaitannya dengan Pendapatan Daerah seperti konsultasi atau rapat/pertemuan dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi/Wilayah serta antar Kabupaten/Kota, masih dapat diikuti sesuai dengan kondisi yang ada dan memanfaatkan sumber dana yang tersedia;
- d. Melakukan perencanaan kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya dengan melihat kembali hasil kinerja tahun sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Peremberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Analisis pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai telah menetapkan target pencapaian kinerja tahun 2023 kepada Walikota Dumai. Sasaran dan Indikator Kinerja serta target pencapaian yang dicapai dengan 2 indikator yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada Tabel T-C.30 sebagai berikut :

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Riau Kota Dumai

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Bapenda				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan			31	32	33	34	31	35	33	34	
2	Persentase Pajak daerah terhadap Pendapatan asli daerah			52	53	54	54	63	66	54	54	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

1. Belum efektifnya penerapan sanksi hukum bagi pelanggar Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga memberi peluang kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi untuk tidak mematuhi
2. Adanya image dari sebagian kecil Perangkat Daerah, bahwa masalah penggalan potensi serta pemungutan penerimaan daerah adalah merupakan tugas dan tanggung jawab penuh Badan Pendapatan Daerah

Tantangan yang harus dihadapi pada Tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya analisis kajian potensi PAD Kota Dumai.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, terdapat beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan. Adapun peluang yang dimiliki oleh Bapenda yaitu sebagai berikut :

- a. Kemampuan masyarakat terhadap pembayaran Pajak daerah, Retribusi Daerah sebagai akumulasi dari pandemi Covid-19 yang telah berakhir.
- b. Masih terjadi deviasi penganggaran terhadap perencanaan terkait target yang telah di tentukan dalam perencanaan.

PAD atau Pendapatan Asli Daerah sangat penting untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait dengan visi dan misi kepala daerah. Kurangnya PAD dapat berdampak negatif terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, di antaranya :

1. Terhambatnya pembangunan infrastruktur
Kurangnya PAD dapat membatasi kemampuan kepala daerah dalam membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, gedung publik, dan fasilitas umum lainnya.
2. Terbatasnya program kesejahteraan masyarakat
Kurangnya PAD dapat membatasi kemampuan kepala daerah untuk melaksanakan program-program kesejahteraan masyarakat seperti program kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
3. Tidak tercapainya target pembangunan
Kurangnya PAD dapat menghambat atau bahkan menghentikan pembangunan di daerah. Hal ini dapat membuat kepala daerah sulit mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.

4. Menurunnya pelayanan publik
Kurangnya PAD dapat menyebabkan kepala daerah sulit menyediakan pelayanan publik yang memadai bagi masyarakat.
5. Tidak terlaksananya program prioritas
Kurangnya PAD dapat membuat kepala daerah sulit untuk melaksanakan program prioritas yang telah ditetapkan. Hal ini dapat membuat masyarakat kecewa dan tidak puas terhadap kepemimpinan daerah.
6. Meningkatnya hutang daerah
Kurangnya PAD dapat memaksa kepala daerah untuk meminjam uang dari bank atau pihak lain untuk membiayai program dan kegiatan. Hal ini dapat meningkatkan hutang daerah dan membebani keuangan daerah di masa depan.

Jadi, kurangnya PAD dapat berdampak negatif terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah serta dapat mempengaruhi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan PAD seperti meningkatkan penerimaan pajak, pungutan retribusi, dan pendapatan lainnya.

Rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Bapenda Tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

1. Melaksanakan sosialisasi/ penyuluhan kepada wajib pajak atau wajib retribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti media elektronik, maupun melakukan pemanggilan atau peringatan kepada wajib pajak atau wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya secara rutin.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan serta system dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah untuk kenyamanan wajib pajak.
3. Meningkatkan pengawasan Pajak Daerah yang berkelanjutan.

Berdasarkan rumusan permasalahan-permasalahan pembangunan yang telah disepakati, maka isu-isu strategis pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan PD dengan mengacu pada isi-isu Strategis Pembangunan Kota Dumai selama kurun waktu 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Belum maksimalnya analisis kajian potensi PAD Kota Dumai
- b. Masih menjadi deviasi penganggaran terhadap perencanaan terkait target yang telah ditentukan dalam perencanaan
- c. Belum optimalnya pengelolaan pendapatan asli daerah kota dumai

- d. Masih kurangnya sumber daya manusia aparatur yang membidangi masalah keuangan baik dari segi kualitas maupun segi jumlah
- e. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi regulasi pajak daerah
- f. Belum optimalnya fungsi pengawasan internal dalam manajemen pemerintah daerah

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen yang menjelaskan rencana pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Dalam penyusunan RKPD, pemerintah daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor dan aspek, seperti potensi daerah, kebutuhan masyarakat, dan keterbatasan sumber daya.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD merupakan proses evaluasi dan analisis terhadap rencana pemerintah daerah. Tujuan dari review ini adalah untuk memastikan bahwa rencana pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, realistis, dan dapat dieksekusi dengan baik. Dalam review ini, berbagai pihak, seperti masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat, dapat memberikan masukan dan saran untuk memperbaiki rancangan awal RKPD.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD sangat penting bagi pemerintah daerah karena dapat membantu memastikan bahwa rencana pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat dieksekusi dengan baik. Hasil review ini juga dapat membantu pemerintah daerah dalam menyusun rencana yang lebih baik dan lebih efektif dalam mengatasi berbagai masalah yang ada di daerah. Oleh karena itu, review terhadap Rancangan Awal RKPD harus dilakukan secara serius dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mencapai hasil yang maksimal. Proses yang dilakukan adalah dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan kebutuhan yang ada di lingkungan kantor Badan pendapatan daerah Kota Dumai.

Dalam mewujudkan rencana program prioritas dan kegiatan yang mendesak, diperlukan analisis yang cermat untuk menentukan kebutuhan perangkat daerah dalam mencapai tujuan tersebut. Pertama-tama, perangkat daerah perlu mempertimbangkan prioritas program yang akan dilaksanakan dan menentukan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankannya. Hal ini meliputi sumber daya manusia, peralatan, bahan, dan sumber daya lainnya. Setelah itu, perangkat daerah perlu membuat estimasi biaya untuk mendapatkan sumber daya tersebut. Selain itu, perangkat daerah juga perlu mempertimbangkan kemungkinan adanya risiko atau tantangan yang mungkin timbul selama pelaksanaan program. Risiko tersebut dapat berupa perubahan kebijakan, perubahan kondisi ekonomi, atau perubahan keadaan di lapangan. Dalam menghadapi risiko tersebut, perangkat daerah perlu memiliki cadangan anggaran yang cukup untuk meminimalkan dampak yang mungkin terjadi.

Pagu Indikatif awal Bapenda pada Rancangan Perubahan Renja 2025 adalah sebesar **Rp. 52.467.784.081** (Lima Puluh Dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah), setelah dilakukan analisa terhadap kebutuhan riil Perangkat Daerah terdapat kebutuhan penambahan pagu sebesar **Rp. 7.000.000.0000** (Tujuh Milyar Rupiah) sehingga jumlah pagu kebutuhan Bapenda adalah sebesar **Rp. 59.467.784.081** (Lima Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah). Hal ini disebabkan oleh kebutuhan penambahan pagu di sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan beberapa Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dimana terdapat alokasi untuk Belanja Insentif ASN dan KDH/WKDH atas pemungutan pajak dan retribusi daerah yang telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemungutan Pajak Daerah. Estimasi Target Penerimaan Pajak Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2025 adalah sekitar Delapan Ratus Milyar, sehingga atas dasar hal tersebut maka Belanja Insentif ASN dan KDH/WKDH yang besaran rata-ratanya 5 (lima) persen dari Target Penerimaan Pajak Daerah juga akan mengalami kenaikan yang signifikan.

Penjelasan atas proses tersebut dapat dilihat pada Tabel T-C.31 sebagai berikut :

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan RKPD tahun 2025
Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Dumai	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	100%	49.569.828.835	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Dumai	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	100%	54.797.828.835	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	15 Dokumen	12.119.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	15 Dokumen	12.119.500	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	12.119.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	12.119.500	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	-	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	-	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	-	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	-	

6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	-	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	-	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	3 Dokumen	45.329.885.081	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	3 Dokumen	50.329.885.081	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Dumai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/bulan	45.319.471.081	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Dumai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/bulan	50.319.471.081	Penambahan Insentif Pemungutan Pajak Daerah atas Kenaikan Target
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	10.414.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	10.414.000	
3	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	-	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Laporan	36.104.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Laporan	36.104.000	
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	36.104.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	36.104.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Laporan	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Laporan	-	
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Dumai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Dumai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	-	
2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Dumai	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	74 Paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Dumai	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	74 Paket	-	

3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Dumai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	74 Orang	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Dumai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	74 Orang	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	154 Dokumen	1.192.508.722	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	154 Dokumen	1.192.508.722
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	60.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	60.000.000
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	120.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	120.000.000
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	164.292.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	164.292.000
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Dumai	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	174.216.722	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Dumai	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	174.216.722
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	24.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	24.000.000
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	650.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	650.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	137 Unit	89.251.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	137 Unit	89.251.000
1	Pengadaan Mebel	Kota Dumai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	-	Pengadaan Mebel	Kota Dumai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	-
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	-
3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	89.251.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	89.251.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11 Laporan	2.474.960.532	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11 Laporan	2.474.960.532

1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	10.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	10.000.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	450.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	450.000.000	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	148.010.952	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	148.010.952	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1.866.949.580	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1.866.949.580	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167 Unit	435.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167 Unit	663.000.000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Dumai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	275.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Dumai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	275.000.000	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	156 Unit	160.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	156 Unit	160.000.000	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	144.000.000	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	84.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kota Dumai	Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	100%	2.897.955.246	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kota Dumai	Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	100%	4.669.955.246	
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Kota Dumai	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target pajak Daerah	100%	2.897.955.246	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Kota Dumai	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target pajak Daerah	100%	4.669.955.246	
1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	105.537.578	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	105.537.578	

2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	8.385.460	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	708.385.460	Penambahan anggaran untuk Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Dumai	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	154.011.168	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Dumai	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	354.011.168	Penambahan anggaran untuk Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Dumai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit	863.663.714	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Dumai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit	1.635.663.714	Penambahan anggaran untuk Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Dumai	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	10 Laporan	141.406.174	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Dumai	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	10 Laporan	216.406.174	Penambahan anggaran untuk Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Dumai	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	391.045.494	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Dumai	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	391.045.494	
7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kota Dumai	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	10 Obyek Pajak	325.325.250	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kota Dumai	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	10 Obyek Pajak	325.325.250	
8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	10 Dokumen	42.911.602	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	10 Dokumen	42.911.602	
9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kota Dumai	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1000 Layanan	391.885.224	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kota Dumai	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1000 Layanan	391.885.224	

10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Dumai	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen	16.510.619	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Dumai	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen	16.510.619	
11	Penagihan Pajak Daerah	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	160.615.156	Penagihan Pajak Daerah	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	185.615.156	Penambahan anggaran untuk Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	53.941.500	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	53.941.500	
13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	98.430.000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	98.430.000	
14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Kota Dumai	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	71.906.307	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Kota Dumai	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	71.906.307	
15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kota Dumai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 Laporan	72.380.000	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kota Dumai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 Laporan	72.380.000	
JUMLAH					52.467.784.081	JUMLAH					59.467.784.081

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Pendapatan Daerah sebagai sebuah instansi pemerintahan yang bertanggung jawab untuk mengelola penerimaan pajak dari masyarakat, seharusnya juga memperhatikan aspirasi dan usulan program dan kegiatan dari masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelaahan terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat pada Badan Pendapatan Daerah. Pertama-tama, perlu dilakukan penelaahan terhadap kualitas dan kredibilitas usulan program dan kegiatan masyarakat. Hal ini meliputi analisis terhadap kebutuhan dan manfaat dari program dan kegiatan tersebut, serta apakah usulan tersebut sesuai dengan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah. Selain itu, perlu juga dilakukan pengecekan terhadap sumber daya dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut, serta apakah Badan Pendapatan Daerah memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Selanjutnya, perlu juga dilakukan penelaahan terhadap efektivitas dan efisiensi dari program dan kegiatan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah. Hal ini meliputi analisis terhadap capaian hasil yang telah dicapai, serta evaluasi terhadap proses pelaksanaan program dan kegiatan tersebut. Dalam evaluasi tersebut, perlu diperhatikan aspek-aspek seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut. Selain itu, perlu juga dilakukan penelaahan terhadap dukungan yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah terhadap program dan kegiatan masyarakat. Hal ini meliputi bagaimana Badan Pendapatan Daerah memberikan dukungan dalam bentuk fasilitas dan sumber daya lainnya, serta bagaimana mereka memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

Dalam melakukan penelaahan terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat pada Badan Pendapatan Daerah, penting juga untuk melibatkan masyarakat secara langsung. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, serta untuk memperkuat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, penelaahan terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat pada Badan Pendapatan Daerah perlu dilakukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan tersebut sesuai dengan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah, serta bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, dukungan yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah terhadap program dan kegiatan masyarakat perlu ditingkatkan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Adapun Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan maupun masyarakat untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kota Dumai

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(12)
NIHIL						

Selama ini, Badan Pendapatan Daerah belum menerima usulan program dan kegiatan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan. Hal ini dapat menjadi masalah karena program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Untuk mengatasi hal ini, solusinya adalah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan di Badan Pendapatan Daerah. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan mengadakan forum-forum partisipatif yang melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam pembuatan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah. Dalam forum partisipatif tersebut, Badan Pendapatan Daerah dapat memperkenalkan visi dan misi, serta memberikan penjelasan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Selain itu, masyarakat dan para pemangku kepentingan juga diberikan kesempatan untuk memberikan masukan, saran, dan usulan terkait program dan kegiatan yang diusulkan oleh Badan Pendapatan Daerah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PD

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai sebuah badan yang bertanggung jawab untuk mengelola pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mengimplementasikan kebijakan nasional terkait dengan penerimaan pajak. Badan Pendapatan Daerah pada dasarnya turut melaksanakan Prioritas Nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, yaitu **“Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”**. Oleh karena itu, perlu dilakukan telaahan untuk melihat bagaimana Badan Pendapatan Daerah menjalankan kebijakan nasional tersebut. Pertama-tama, penting untuk melihat sejauh mana Badan Pendapatan Daerah mampu mengimplementasikan kebijakan nasional dengan baik. Hal ini meliputi bagaimana Badan Pendapatan Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, serta bagaimana memastikan bahwa kebijakan tersebut dilaksanakan secara konsisten dan tepat waktu. Selain itu, perlu juga untuk memperhatikan bagaimana Badan Pendapatan Daerah menjaga hubungan yang baik dengan instansi terkait lainnya seperti Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hubungan yang baik ini sangat penting untuk memastikan terciptanya koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan kebijakan nasional terkait dengan penerimaan pajak daerah.

Dalam melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional oleh Badan Pendapatan Daerah, juga perlu diperhatikan bagaimana Badan Pendapatan Daerah memperhatikan kepentingan masyarakat dalam penerimaan pajak daerah. Hal ini meliputi bagaimana Badan Pendapatan Daerah menentukan tarif pajak daerah yang wajar dan adil, serta bagaimana mereka memperhatikan kepentingan masyarakat dalam mengajukan permohonan pembebasan atau pengurangan pajak. Tidak hanya itu, penting juga untuk melihat bagaimana Badan Pendapatan Daerah melakukan inovasi dalam meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini meliputi bagaimana pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang ada untuk memudahkan proses pembayaran pajak, serta bagaimana mereka memperkenalkan program-program baru yang dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Secara keseluruhan, telaahan terhadap kebijakan nasional oleh Badan Pendapatan Daerah perlu dilakukan untuk memastikan terciptanya koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan kebijakan nasional terkait dengan penerimaan pajak, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut memperhatikan kepentingan masyarakat. Selain itu,

inovasi dalam meningkatkan penerimaan pajak juga perlu dilakukan untuk memastikan tercapainya target pendapatan daerah yang diinginkan.

Dalam rangka memenuhi amanat Pasal 114 dan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (PP No. 10 Tahun 2021). Pengaturan PP No. 10 Tahun 2021 ini bertujuan memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung kebijakan fiskal nasional, kemudahan berusaha dan layanan daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, PP No.10 Tahun 2021 mengatur pokok-pokok kebijakan sebagai berikut:

- a. penyesuaian tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) pada proyek strategis nasional (PSN);
- b. evaluasi rancangan Perda dan Perda mengenai PDRD;
- c. pengawasan Perda mengenai PDRD;
- d. dukungan insentif pelaksanaan kemudahan berusaha; dan
- e. sanksi administratif.

Kebijakan penyesuaian tarif PDRD bertujuan mendukung kemudahan berinvestasi dan pertumbuhan industri dalam rangka percepatan pelaksanaan PSN yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan usulan Kementerian/Lembaga penanggung jawab PSN kepada Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan memberikan rekomendasi penyesuaian tarif PDRD yang kemudian menjadi dasar bagi Kementerian/Lembaga penanggung jawab PSN untuk mengajukan usulan penyusunan Peraturan Presiden. Peraturan Presiden tersebut paling sedikit memuat PSN yang mendapat penyesuaian tarif, jenis PDRD yang disesuaikan, besaran penyesuaian tarif, mulai berlakunya penyesuaian tarif, jangka waktu penyesuaian tarif, dan daerah yang mendapatkan penyesuaian tarif.

3.2 Tujuan dan sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

Sebagai langkah awal agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta sinkron dengan Rencana Program Jangka Menengah Daerah, maka Badan Pendapatan Daerah melakukan pendekatan perencanaan strategik yang jelas, terukur dan sinergis, guna menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 yang disusun merupakan bagian integral dari implementasi Visi dan Misi Walikota Dumai periode 2021 – 2026 yang menginginkan agar dalam periode kepemimpinan lima tahun dapat mewujudkan Visi Pembangunan Kota Dumai, yaitu:

“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”

Untuk itu penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai harus dilakukan secara serius dan bersinergi antar lembaga sehingga seluruh target indikator yang menjadi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai yang telah dirumuskan dapat dicapai.

Badan Pendapatan Kota Dumai dalam mendukung Visi Kota Dumai, termasuk dalam Misi Ke 4, yaitu:

“ Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang baik ”

Untuk mewujudkan kondisi 5 tahun ke depan sebagai bagian dari upaya pencapaian Visi Kota Dumai, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai merumuskan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerjanya ke dalam Tabel dibawah ini :

**Tabel 3.2.1
Tujuan Perangkat Daerah**

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)							
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	30	31	32	33	34	34

Tabel 3.2.2
Sasaran Perangkat Daerah

Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah							
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2023	2024	2025	2025	2026	
Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	51	52	53	54	54	54

Visi tersebut berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana PD Badan Pendapatan Daerah akan dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan inovatif, serta produktif dalam hal optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah, hal ini sejalan dengan ekspektasi publik terhadap pendirian Badan Pendapatan Daerah. Visi tersebut merupakan suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan harapan yang ingin diwujudkan oleh Badan Pendapatan Daerah yakni menjadikan Pajak Daerah sebagai Unggulan dalam hal penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Sebagai penjabaran atas visi tersebut, melalui tahapan pembahasan potensi, permasalahan dan berbagai isu strategis di tingkat PD, agar seluruh pegawai Badan Pendapatan Daerah dan stakeholders yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal Bapenda dan peran Bapenda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, telah dirumuskan misi ke-4 yang akan dilaksanakan.

3.3 Program dan Kegiatan

Badan Pendapatan Daerah merupakan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam mengelola dan meningkatkan pendapatan daerah. Sebagai Perangkat Daerah yang memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian daerah, Bapenda perlu memiliki Perubahan Rencana Kerja program dan kegiatan prioritas yang jelas dan terstruktur.

Salah satu prioritas utama dalam Perubahan Rencana Kerja Bapenda adalah peningkatan penerimaan pajak daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti memperketat pengawasan terhadap pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak secara tepat waktu dan benar, serta melakukan upaya penegakan hukum bagi wajib pajak yang melanggar aturan. Selain itu, Bapenda juga perlu

memperhatikan pengelolaan keuangan daerah dengan baik, agar tidak terjadi penggunaan anggaran yang tidak efektif dan efisien. Oleh karena itu, perlu pengoptimalan penggunaan teknologi informasi dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja keuangan daerah dan juga perlu perhatian pada pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, dengan melakukan pelatihan dan pendidikan kepada para pegawai, sehingga mereka dapat bekerja lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Bapenda juga perlu melakukan kerja sama dengan instansi lain yang terkait dalam meningkatkan pendapatan daerah, seperti Dinas Perdagangan, DPMPTSP, Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata, dan lain sebagainya. Dengan kerja sama yang baik, diharapkan dapat tercipta sinergi dalam meningkatkan perekonomian daerah.

Dengan Perubahan Rencana Kerja program dan kegiatan prioritas yang jelas dan terstruktur, Bapenda diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pendapatan daerah dan perekonomian daerah secara keseluruhan. Capaian target dan realisasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai ditopang oleh Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Sub Kegiatan pendukung antara lain :

1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
6. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
7. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
8. Penetapan Wajib Pajak Daerah
9. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
10. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
11. Penagihan Pajak Daerah
12. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
13. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
14. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
15. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Adapun sub kegiatan di atas merupakan indikator keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) Kota Dumai. Langkah yang perlu diambil guna meningkatkan pencapaian sasaran outcome di masa yang akan datang adalah:

- a. Optimalisasi Sumber Daya Manusia untuk mencapai sasaran demi mewujudkan tujuan organisasi dengan cara mengarahkan personil sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- b. Upaya meningkatkan potensi daerah yang terbatas, dengan cara :
 - 1) Mengadakan pengkajian dan penelitian yang ada kaitannya dengan potensi Pendapatan Daerah;
 - 2) Mengintensifkan Potensi daerah yang ada, melalui :
 - Penggalian potensi Pendapatan Daerah yang dimungkinkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang Pendapatan Daerah;
 - Penyesuaian sistem pengelolaan anggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan pola peningkatan kerjasama Pemerintah, swasta dan masyarakat.
 - 3) Pemenuhan kebutuhan organisasi dalam pelaksanaan pelayanan internal dan eksternal dengan penetapan sistem pelayanan minimal.
- c. Melakukan konsultasi dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan Pendapatan Daerah. Meskipun dana untuk mengikutsertakan pegawai pada kegiatan khusus belum tersedia, namun aktivitas dan kegiatan lain yang ada kaitannya dengan Pendapatan Daerah seperti konsultasi atau rapat/pertemuan dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi/Wilayah serta antar Kabupaten/Kota, masih dapat diikuti sesuai dengan kondisi yang ada dan memanfaatkan sumber dana yang tersedia;
- d. Melakukan perencanaan kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya dengan melihat kembali hasil kinerja tahun sebelumnya.

Perubahan Rencana Kerja program dan kegiatan serta pagu indikatif pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel T-C.33 berikut :

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prioritas			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Nasional	Provinsi		Daerah	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							Tolok Ukur	Target		Pagu Indikatif (Rp.)		
5																				
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																			
5	2									52.467.784.081							59.467.784.081			
5	2	1								49.569.828.835							54.797.828.835			
5	2	1	2.01							12.119.500							12.119.500			
5	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	2 Dokumen	15 Dokumen	12.119.500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	07. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	09. Peningkatan Pelayanan Publik	05. Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	100 %	12.119.500
5	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	2 Dokumen	15 Dokumen	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	07. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	09. Peningkatan Pelayanan Publik	05. Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	100 %	-

5	2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	2 Dokumen	15 Dokumen	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	07. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	09. Peningkatan Pelayanan Publik	05. Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	100 %	-
5	2	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	2 Dokumen	15 Dokumen	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	07. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	09. Peningkatan Pelayanan Publik	05. Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	100 %	-
5	2	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	2 Dokumen	15 Dokumen	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	07. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	09. Peningkatan Pelayanan Publik	05. Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	100 %	-
5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	4 Laporan	15 Dokumen	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	07. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	09. Peningkatan Pelayanan Publik	05. Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	100 %	-

5	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 Laporan	15 Dokumen	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	07. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	09. Peningkatan Pelayanan Publik	05. Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	100 %	-
5	2	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								45.329.885.081								50.329.885.081
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	74 Orang/bulan	3 Dokumen	45.319.471.081	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	07. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	09. Peningkatan Pelayanan Publik	05. Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	100 %	50.319.471.081
5	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	2 Laporan	3 Dokumen	10.414.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	07. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	09. Peningkatan Pelayanan Publik	05. Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	100 %	10.414.000
5	2	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 Dokumen	3 Dokumen	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	07. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	09. Peningkatan Pelayanan Publik	05. Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	100 %	-
5	2	1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								36.104.000								36.104.000

5	2	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	2 Laporan	2 Laporan	36.104.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	07. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	09. Peningkatan Pelayanan Publik	05. Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	100 %	36.104.000		
5	2	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	-	
5	2	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	2 Unit	3 Laporan	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	07. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	09. Peningkatan Pelayanan Publik	05. Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	100 %	-		
5	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	74 Paket	3 Laporan	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	07. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	09. Peningkatan Pelayanan Publik	05. Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	100 %	-		
5	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	74 Orang	3 Laporan	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	07. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	09. Peningkatan Pelayanan Publik	05. Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	100 %	-		
5	2	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																	1.192.508.722	1.192.508.722

5	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 Paket	154 Dokumen	60.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	07. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	09. Peningkatan Pelayanan Publik	05. Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	100 %	60.000.000
5	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	2 Paket	154 Dokumen	120.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	07. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	09. Peningkatan Pelayanan Publik	05. Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	100 %	120.000.000
5	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	3 Paket	154 Dokumen	164.292.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	07. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	09. Peningkatan Pelayanan Publik	05. Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	100 %	164.292.000
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	2 Paket	154 Dokumen	174.216.722	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	07. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	09. Peningkatan Pelayanan Publik	05. Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	100 %	174.216.722
5	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	4 Dokumen	154 Dokumen	24.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	07. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	09. Peningkatan Pelayanan Publik	05. Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	100 %	24.000.000

5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	150 Laporan	154 Dokumen	650.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	07. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	09. Peningkatan Pelayanan Publik	05. Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	100 %	650.000.000
5	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							89.251.000								89.251.000
5	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	10 Unit	137 Unit	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	07. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	09. Peningkatan Pelayanan Publik	05. Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	100 %	-
5	2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	16 Unit	137 Unit	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	07. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	09. Peningkatan Pelayanan Publik	05. Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	100 %	-
5	2	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 Unit	137 Unit	89.251.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	07. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	09. Peningkatan Pelayanan Publik	05. Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	100 %	89.251.000
5	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2.474.960.532								2.474.960.532

5	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	2 Laporan	11 Laporan	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	07. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	09. Peningkatan Pelayanan Publik	05. Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	100 %	10.000.000
5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	4 Laporan	11 Laporan	450.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	07. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	09. Peningkatan Pelayanan Publik	05. Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	100 %	450.000.000
5	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 Laporan	11 Laporan	148.010.952	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	07. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	09. Peningkatan Pelayanan Publik	05. Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	100 %	148.010.952
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	4 Laporan	11 Laporan	1.866.949.580	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	07. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	09. Peningkatan Pelayanan Publik	05. Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	100 %	1.866.949.580
5	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							435.000.000								663.000.000

5	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	9 Unit	167 Unit	275.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	07. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	09. Peningkatan Pelayanan Publik	05. Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	100 %	275.000.000						
5	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	156 Unit	167 Unit	160.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	07. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	09. Peningkatan Pelayanan Publik	05. Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	100 %	160.000.000						
5	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 Unit	167 Unit	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	07. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	09. Peningkatan Pelayanan Publik	05. Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	100 %	144.000.000						
5	2	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 Unit	167 Unit	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	07. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	09. Peningkatan Pelayanan Publik	05. Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	100 %	84.000.000						
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH																2.897.955.246			4.669.955.246		
5	2	4	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah																		2.897.955.246			4.669.955.246

5	2	4	2.01	1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target pajak Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 Dokumen	100 %	105.537.578	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	07. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	09. Peningkatan Pelayanan Publik	05. Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	100 %	105.537.578
5	2	4	2.01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target pajak Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 Dokumen	100 %	8.385.460	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	07. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	09. Peningkatan Pelayanan Publik	05. Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	100 %	708.385.460
5	2	4	2.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target pajak Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 Laporan	100 %	154.011.168	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	07. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	09. Peningkatan Pelayanan Publik	05. Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	100 %	354.011.168
5	2	4	2.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target pajak Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 Unit	100 %	863.663.714	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	07. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	09. Peningkatan Pelayanan Publik	05. Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	100 %	1.635.663.714
5	2	4	2.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target pajak Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	10 Laporan	100 %	141.406.174	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	07. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	09. Peningkatan Pelayanan Publik	05. Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	100 %	216.406.174

5	2	4	2.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target pajak Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 Laporan	100 %	391.045.494	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	07. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	09. Peningkatan Pelayanan Publik	05. Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	100 %	391.045.494
5	2	4	2.01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target pajak Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	10 Obyek Pajak	100 %	325.325.250	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	07. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	09. Peningkatan Pelayanan Publik	05. Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	100 %	325.325.250
5	2	4	2.01	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target pajak Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	10 Dokumen	100 %	42.911.602	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	07. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	09. Peningkatan Pelayanan Publik	05. Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	100 %	42.911.602
5	2	4	2.01	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target pajak Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1000 Layanan	100 %	391.885.224	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	07. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	09. Peningkatan Pelayanan Publik	05. Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	100 %	391.885.224
5	2	4	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target pajak Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 Dokumen	100 %	16.510.619	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	07. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	09. Peningkatan Pelayanan Publik	05. Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	100 %	16.510.619

5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target pajak Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 Dokumen	100 %	160.615.156	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	07. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	09. Peningkatan Pelayanan Publik	05. Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	100 %	185.615.156										
5	2	4	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target pajak Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 Dokumen	100 %	53.941.500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	07. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	09. Peningkatan Pelayanan Publik	05. Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	100 %	53.941.500										
5	2	4	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target pajak Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 Dokumen	100 %	98.430.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	07. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	09. Peningkatan Pelayanan Publik	05. Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	100 %	98.430.000										
5	2	4	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target pajak Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 Laporan	100 %	71.906.307	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	07. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	09. Peningkatan Pelayanan Publik	05. Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	100 %	71.906.307										
5	2	4	2.01	15	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target pajak Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	4 Laporan	100 %	72.380.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	07. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	09. Peningkatan Pelayanan Publik	05. Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	100 %	72.380.000										
TOTAL																						52.467.784.081								59.467.784.081

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

4.1 Rencana Program

Program adalah instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta penyediaan alokasi anggaran. Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan pada Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai untuk periode 2021-2026, maka untuk Perubahan Rencana Kerja Program Bapenda Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

4.2 Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya perangkat daerah sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Rencana program maupun kegiatan dan sub kegiatan yang dituangkan dalam rencana strategis bersifat indikatif, yang berarti bahwa informasi sumber daya yang diperlukan sebagai masukan maupun target keluaran, manfaat, dan dampak yang dirumuskan hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai.

Penyusunan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai merupakan rangkaian perencanaan dari penjabaran Visi, Misi, Strategi dan Kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan yang bersumber dari alokasi dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Dumai, APBD Provinsi Riau dan APBN atau sumber pendanaan lain yang sah. Program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai disesuaikan dengan bidang-bidang dalam organisasi dan tata kerja yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), serta mengacu pada Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021–2026.

Untuk menterjemahkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan kedalam bentuk yang lebih operasional, maka indikasi rencana program prioritas perlu disusun sesuai dengan kebutuhan pendanaan (anggaran) yang diperlukan. Indikasi program ini disusun dalam bentuk rencana program prioritas

yang disertai dengan indikator kinerja hasil (*outcome*). Perkiraan kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kapasitas keuangan daerah

Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala PD. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala PD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan.

Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis serta dilakukan pada identifikasi permasalahan berikut Tabel 4.1 dan 4.2 yang memberikan rincian rencana program prioritas kebutuhan pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai untuk Tahun 2025.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi dan Perkantoran

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- f) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- g) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya

b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

c) Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai

5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

a) Pengadaan Mebel

b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

c) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

d) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- 8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

- 1) Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Perencanaan pengelolaan pajak daerah
- b) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
- c) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- d) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
- e) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- f) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- g) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- h) Penetapan Wajib Pajak Daerah
- i) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- j) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- k) Penagihan Pajak Daerah
- l) Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- m) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- n) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- o) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Tabel 4.1
Rencana Kerja Program dan Pendanaan
Badan Pendapatan Daerah
Kota Dumai Tahun 2025

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Tahun 2025	
				Target	Rp.
1	2		3	5	6
5.02.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100%	49.569.828.835
5.02.04	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	100%	2.897.955.246
Total					52.467.784.081

Tabel 4.2
Rencana Kerja Kegiatan dan Pendanaan
Badan Pendapatan Daerah
Kota Dumai Tahun 2025

No	Kode Rekening	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Pagu Awal	Pagu Akhir
1	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	100%	49.569.828.835	54.797.828.835
1	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	15 Dokumen	12.119.500	12.119.500
1	5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	12.119.500	12.119.500
2	5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	-	-
3	5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	-	-
4	5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	-	-
5	5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	-	-
6	5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	-	-
7	5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	-	-
2	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	3 Dokumen	45.329.885.081	50.329.885.081
8	5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/bulan	45.319.471.081	50.319.471.081
9	5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	10.414.000	10.414.000
10	5.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	-	-
3	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Laporan	36.104.000	36.104.000
11	5.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	36.104.000	36.104.000
4	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Laporan	-	-
12	5.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	-	-
13	5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	74 Paket	-	-

14	5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	74 Orang	-	-
5	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	154 Dokumen	1.192.508.722	1.192.508.722
15	5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	60.000.000	60.000.000
16	5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	120.000.000	120.000.000
17	5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	164.292.000	164.292.000
18	5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	174.216.722	174.216.722
19	5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	24.000.000	24.000.000
20	5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	650.000.000	650.000.000
6	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137 Unit	89.251.000	89.251.000
21	5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	-	-
22	5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	-	-
23	5.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	89.251.000	89.251.000
7	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11 Laporan	2.474.960.532	2.474.960.532
24	5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	10.000.000	10.000.000
25	5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	450.000.000	450.000.000
26	5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	148.010.952	148.010.952
27	5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1.866.949.580	1.866.949.580
8	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167 Unit	435.000.000	663.000.000
28	5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	275.000.000	275.000.000
29	5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	156 Unit	160.000.000	160.000.000
30	5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	144.000.000
31	5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	84.000.000

2	5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	100%	2.897.955.246	4.669.955.246
9	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target pajak Daerah	100%	2.897.955.246	4.669.955.246
32	5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	105.537.578	105.537.578
33	5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	8.385.460	708.385.460
34	5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	154.011.168	354.011.168
35	5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit	863.663.714	1.635.663.714
36	5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	10 Laporan	141.406.174	216.406.174
37	5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	391.045.494	391.045.494
38	5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	10 Obyek Pajak	325.325.250	325.325.250
39	5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	10 Dokumen	42.911.602	42.911.602
40	5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1000 Layanan	391.885.224	391.885.224
41	5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen	16.510.619	16.510.619
42	5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	160.615.156	185.615.156
43	5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	53.941.500	53.941.500
44	5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	98.430.000	98.430.000
45	5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	71.906.307	71.906.307
46	5.02.04.2.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 Laporan	72.380.000	72.380.000
JUMLAH					52.467.784.081	59.467.784.081

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2025 ini merupakan Rencana Kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah (Renstra) Bapenda Tahun 2021 – 2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Walikota Dumai serta target dan sasaran pembangunan melalui Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Dumai Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja ini menjadi sangat penting dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat.

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja ini, diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdayaguna, serta semua pihak memiliki satu persepsi tentang Perubahan Rencana Kerja sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dapat mencapai hasil yang optimal.

Dumai, 21 Juli 2025

KEPALA,



FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19780710 199711 1 001